

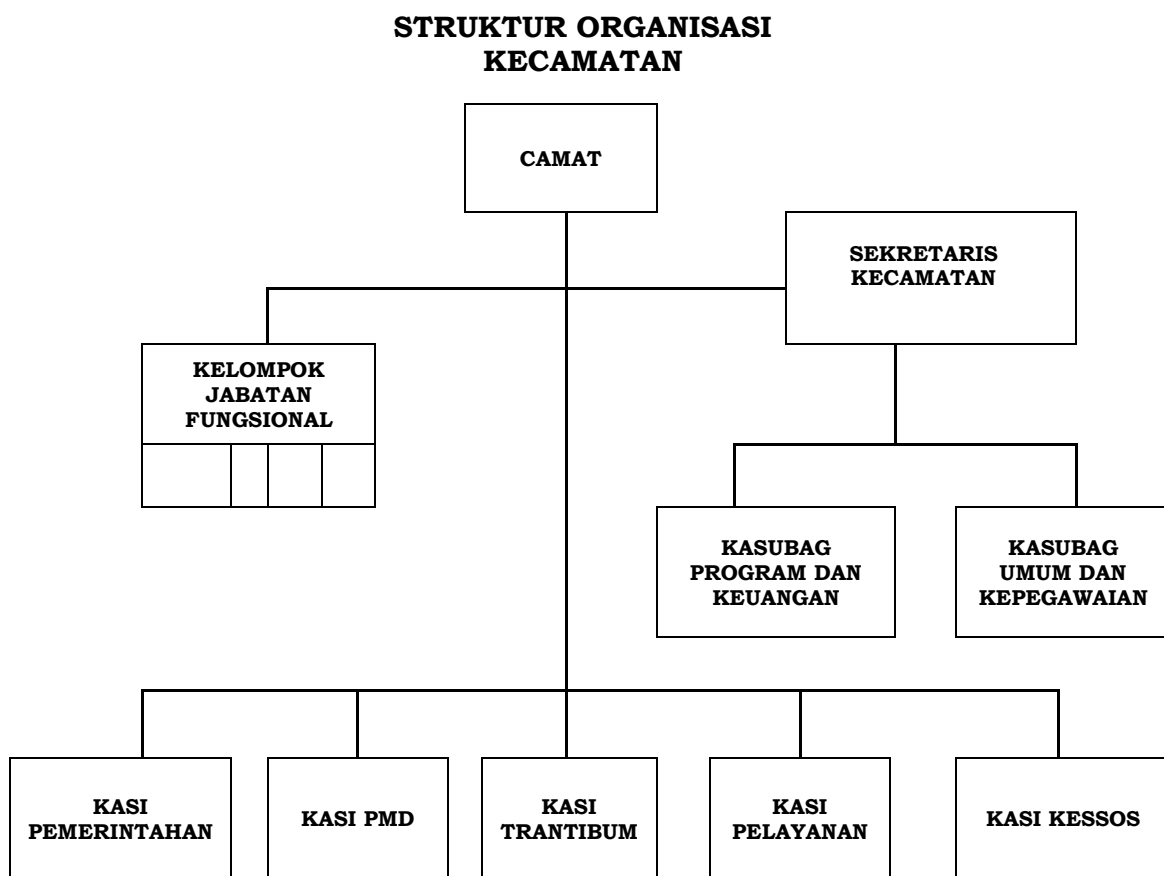
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Jaken terdiri atas:



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009

tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran

		<p>masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan.

	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).
--	---

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.

Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Jaken, 2016

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Jaken berjumlah 16 orang, terdiri dari 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	Kec.Jaken								
1	Camat	1						1	
2	Sekcam	1						1	
3	Kasubag Program dan Keuangan								
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian				1			1	
5	Kasi Pemerintahan				1			1	
6	Kasi PMD				1			1	
7	Kasi Trantibum			1				1	
8	Kasi Pelayanan Umum				1			1	
9	Kasi Kessos				1			1	
10	Staf Seksi Pemerintahan					2		2	
11	Staf Seksi Trantibum					1		1	
12	Staf Seksi Yanum					1		1	
13	Staf Seksi PMD								
14	Non PNS					4	1	5	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Jaken, Januari 2017

Tabel II.4
Kondisi Kepegawaian di Kec.Jaken Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Camat									1		1	
2	Sekcam							1				1	
3	Kasubag Program dan Keuangan												
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian								1			1	
5	Kasi Pemerintahan									1		1	
6	Kasi PMD							1				1	
7	Kasi Trantibum							1				1	
8	Kasi Pelayanan Umum							1				1	
9	Kasi Kessos								1			1	
10	Staf Seksi Pemerintahan					1		1				2	
11	Staf Seksi Trantibum												
12	Staf Seksi Pelayanan					1						1	
13	Staf Seksi PMD												
14	Non PNS	1		1	1			2				5	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Jaken, Januari 2017

Tabel II.5
Kondisi Kepegawaian di Kec. Jaken
Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol I		Gol II		Gol III		Gol IV		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Camat							1		1	
2	Sekcam							1		1	
3	Kasubag Program dan Keuangan										

No	Uraian	Gol I		Gol II		Gol III		Gol IV		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian					1					1

5	Kasi Pemerintahan					1					1
6	Kasi PMD					1					1
7	Kasi Trantibum							1		1	
8	Kasi Pelayanan					1					1
9	Kasi Kessos						1				1
10	Staf Seksi Pemerintahan			1		1				2	
11	Staf Seksi Trantibum										
12	Staf Seksi Pelayanan			1						1	
13	Staf Seksi PMD										
14	Non PNS									4	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Jaken, Januari 2017

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	3	Unit	Baik	Kantor,Aula, Rumah Dinas
2	Ruangan Kantor	6	Ruang	5 Baik 1 kurang baik	
3	Kendaraan roda 4	1	Unit	Baik	
4	Kendaraan roda 2	7	Unit	6 Baik 1 Kurang Baik	
5	Peralatan Kerja				
	- Komputer	3	Unit	2 baik 1 kurang baik	
	- Laptop	3	Unit	2 baik 1 kurang baik	
	- Printer	3	Unit	2 baik 1 kurang baik 1 rusak	
	- Meja	24	Unit	21 baik 3 kurang	

				baik	
	- Kursi	28	Unit	24 baik 4 kurang baik	
	- Almari	6	Unit	3 baik 3 kurang baik	
	- Filling Kabinet	9	Unit	6 baik 3 kurang baik	
	-AC	4	Unit	baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Jaken, Januari 2017

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia baru sebanyak 7 unit terdiri dari 1 unit mobil dan 6 unit sepeda motor (5 unit baik, 2 unit kurang baik) maka kedepan pemerintah Kecamatan Jaken masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 6 unit sepeda motor terdiri dari 4 unit untuk pejabat yang belum mendapatkan kendaraan operasional dan 3 unit untuk penggantian kendaraan operasional yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Jaken saat ini sebanyak 3 unit dengan 2 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka kedepan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 4 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian komputer yang kurang baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Jaken saat ini sebanyak 3 unit dengan 2 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka kedepan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 9 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Jaken saat ini sebanyak 3 unit dengan 2 dalam kondisi baik, 1 kondisi kurang baik dan 1 kondisi rusak, maka kedepan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 9 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Jaken saat ini sebanyak 24 unit dengan 21 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka kedepan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Jaken saat ini sebanyak 28 unit dengan 24 dalam kondisi baik dan 4 kondisi kurang baik, maka kedepan

masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 9 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Jaken saat ini sebanyak 5 unit, 4 unit dengan kondisi baik, 1 unit kurang baik. maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 3 unit lagi untuk ruangan yang belum terdapat AC.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Jaken saat ini sebanyak 6 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 6 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

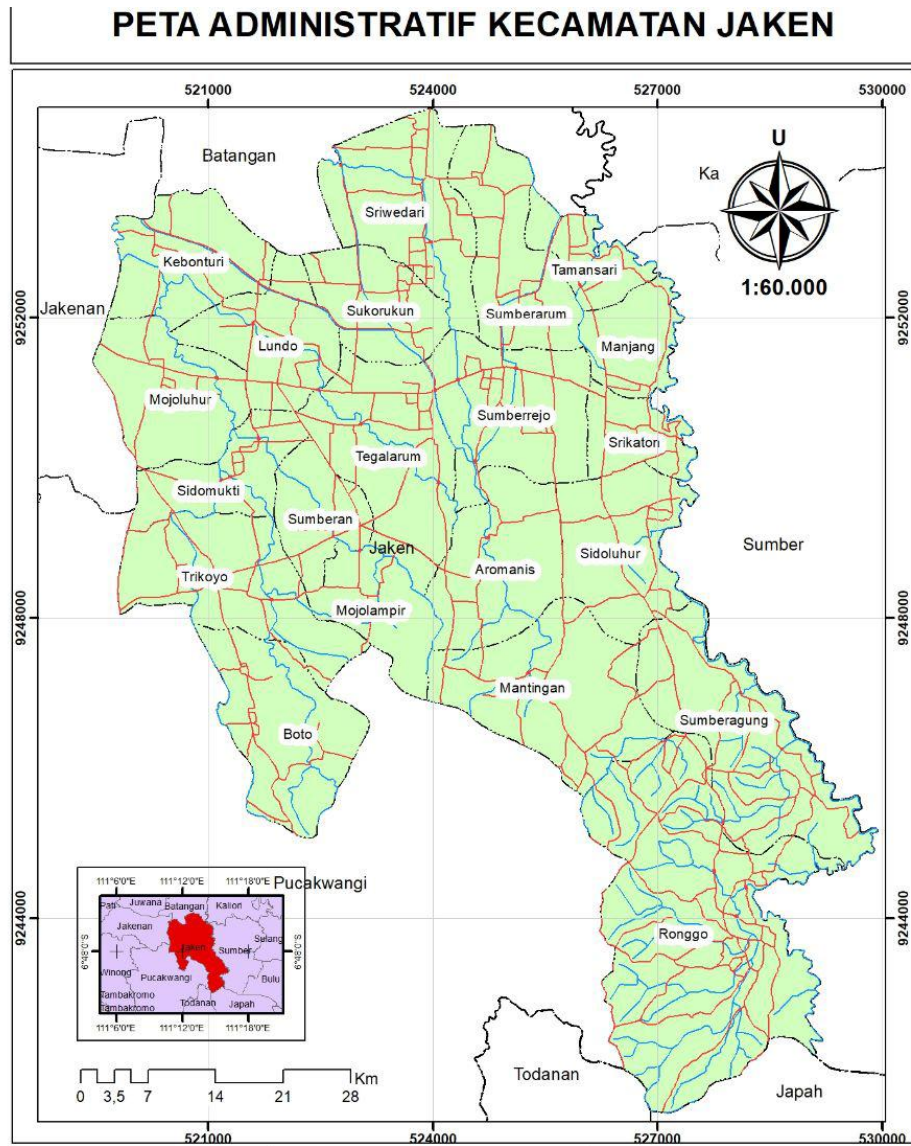
Kondisi jumlah filing cabinet di Kecamatan Jaken saat ini sebanyak 9 unit dengan 6 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filing cabinet sebanyak 6 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filing cabinet dan penggantian filing cabinet yang kurang baik dan rusak.

2.2.3. Kondisi umum Kecamatan Jaken

2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Jaken merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 6.852 Ha. Secara administratif Kecamatan Jaken dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Pucakwangi
- Bagian Utara : Kecamatan Batangan
- Bagian Timur : Kabupaten Rembang
- Bagian Barat : Kecamatan Jakenan



Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Jaken dapat dilihat dalam tabel II.7 berikut ini :

Tabel II.7
Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Jaken

No	Desa	Luas Wilayah	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1.	Boto	335	9	3	a. b.
2.	Trikoyo	365	17	4	
3.	Sumberan	140	5	1	
4.	Mojolampir	174	12	2	
5.	Mantingan	519	15	3	
6.	Ronggo	795	35	8	
7.	Sumberagung	767	13	4	

8.	Sidoluhur	229	17	4
9.	Srikaton	201	15	7
10.	Arumanis	435	21	5
11.	Tegalarum	443	16	4
12.	Sidomukti	219	9	3
13.	Mojoluhur	276	14	3
14.	Kebonturi	311	11	2
15.	Lundo	264	10	3
16.	Sukorukun	267	10	2
17.	Sumberejo	293	29	7
18.	Manjang	163	12	5
19.	Tamansari	158	8	2
20.	Sumberarum	239	13	4
21.	Sriwedari	259	20	5

Sumber: Seksi Pemerintahan Kecamatan Jaken, 2016

2.2.3.2. Keadaan Penduduk

Kecamatan Jaken memiliki jumlah penduduk sebanyak 47.965 jiwa, yang terdiri dari 23.380 jiwa laki-laki dan 24.585 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Jaken tahun 2016 berjumlah 14.085 KK. Berdasarkan data Kecamatan Jaken Dalam Angka tahun 2016 kepadatan penduduk sebesar 700 jiwa per km². Profil kependudukan Kecamatan Jaken digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel II.8

Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Jaken

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
1	0-4	1.339	51,03	1.316	48,97	2.655	100
2	5-9	1.442	52,83	1.427	47,17	2.869	100
3	10-14	1.413	52,35	1.430	47,65	2.843	100
4	15-19	1.582	51,73	1.502	48,27	3.084	100
5	20-24	1.485	48,63	1.534	51,37	3.019	100
6	25-29	1.309	47,05	1.485	52,95	2.794	100
7	30-34	1.434	47,03	1.681	52,97	3.115	100
8	35-39	1.609	48,25	1.751	51,75	3.360	100

9	40-44	1.580	49,31	1.699	50,69	3.279	100
10	45-49	1.669	48,86	1.786	51,14	3.455	100
11	50-54	1.425	49,18	1.590	50,82	3.015	100
12	55-59	1.294	50,37	1.388	49,63	2.682	100
13	60-64	1.147	54,21	1.166	45,79	2.313	100
14	65-69	757	48,19	821	51,81	1.578	100
15	70-74	507	45,00	668	55,00	1.175	100
16	75+	562	33,63	941	66,37	1.503	100

Sumber: Kecamatan Jaken dalam angka 2016

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Jaken sebagai berikut :

Tabel II.9

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Jaken

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Tidak/Belum sekolah	2.162	3.139	5.301	19,38%
2	Belum tamat SD/MI	2.703	2.720	5.423	12,44%
3	Tamat SD/MI	6.449	7.337	13.786	34,29%
4	SLTP/Sederajat	6.626	7.346	13.972	19,87%
5	SLTA/Sederajat	5.384	5.584	10.968	11,29%
6	DI/DII	405	498	903	0,29%
7	Akademi/DIII/Sarmud	517	610	1127	0,58%
8	Diploma IV/S1	809	860	1669	1,80%
9	S2	18	8	26	0,06%
10	S3	0	2	2	0,00%
	JUMLAH			47.965	100%

Sumber: Data Dispendukcapil Kab.Pati, 2016

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Jaken sebagai berikut :

Tabel II.10

Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Jaken

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	4.487	4.136	8.623	19,78%
2	Mengurus rumah tangga	8	7.732	7.740	17,75%
3	Pelajar/mahasiswa	3.224	2.725	5.949	13,65%
4	Pensiunan	56	17	73	0.17%

5	PNS	133	106	239	0,55%
6	TNI	28	0	28	0,06%
7	Polri	40	0	40	0,09%
8	Pedagang	146	358	504	1,16%
9	Petani/pekebun	4.438	2.621	7.459	17,11%
10	Peternak	3	4	7	0,02%
11	Nelayan/Perikanan	1.529	4	1.533	0,26%
12	Industri	51	62	113	0,026%
13	Konstruksi	13	0	13	0,03%
14	Transportasi	29	0	29	0,07%
15	Karyawan swasta	1.407	1.115	2.522	5,79%
16	Karyawan BUMN	14	6	20	0,05%
17	Karyawan BUMD	9	0	9	0,02%
18	Karyawan Honorer	23	30	53	0,12%
19	Buruh harian lepas	295	238	533	1,22%
20	Buruh tani/Perkebunan	473	423	894	2,05%
21	Buruh Nelayan/Perikanan	165	14	179	0,41%
22	Buruh Peternakan	3	0	3	0,01%
23	Pembantu Rumah Tangga	0	35	35	0,08%
24	Tukang Cukur	2	0	2	0,00%
25.	Tukang Listrik	2	0	2	0,00%
26.	Tukang Batu	206	0	206	0,47%
27	Tukang Kayu	187	0	187	0,43%
28	Tukang Sol Sepatu	1	0	1	0,00%
29	Tukang Las/Pandai Besi	15	0	15	0,03%
30	Tukang Gigi	1	0	1	0,00%
31	Penata Rias	0	4	4	0,00%
32	Penata Busana	0	0	0	0,00%
33	Penata Rambut	0	0	0	0,00%
32	Penata Busana	21	0	21	0,05%
33	Seniman	17	3	20	0,05%
34	Tabib	0	0	0	0,00%
35	Paraji	0	2	2	0,00%
36	Perancang Busana	0	0	0	0,00%
37	Penterjemah	0	0	0	0,00%
38	Imam Masjid	0	0	0	0,00%
39	Pendeta	5	1	6	0,01%

40	Pastor	0	0	0	0,00%
41	Wartawan	1	0	1	0,00%
42	Ustadz/Mubaligh	6	1	7	0,02%
43	Juru Masak	5	0	5	0,01%
44	Promotor Acara	0	0	0	0,00%
45	Anggota DPR RI	0	0	0	0,00%
46	Anggota DPD	0	0	0	0,00%
47	Anggota BPK	0	0	0	0,00%
48	Presiden	0	0	0	0,00%
49	Wakil Presiden	0	0	0	0,00%
50	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0,00%
51	Anggota Kabinet/Kementerian	0	0	0	0,00%
52	Duta Besar	0	0	0	0,00%
53	Gubernur	0	0	0	0,00%
54	Wakil Gubernur	0	0	0	0,00%
55	Bupati	1	0	1	0,00
56	Wakil Bupati	0	0	0	0,00%
57	Walikota	0	0	0	0,00%
58	Wakil Walikota	0	0	0	0,00%
59	Anggota DPRD Prop.	0	0	0	0,00%
60	Anggota DPRD Kab.	3	0	3	0,00%
61	Dosen	5	5	10	0,02
62	Guru	92	222	314	0,68%
63	Pilot	0	0	0	0,00%
64	Pengacara	0	0	0	0,00%
65	Notaris	0	1	1	0,00%
66	Arsitek	1	0	1	0,00%
67	Akuntan	0	0	0	0,00%
68	Konsultan	0	0	0	0,00%
69	Dokter	1	5	6	0,01%
70	Bidan	0	39	39	0,09%
71	Perawat	4	19	23	0,04%
72	Apoteker	0	1	1	0,00%
73	Psikiater/Psikolog	0	0	0	0,00%
74	Penyiar Televisi	0	0	0	0,00%

75	Penyiar Radio	1	0	1	0,00%
76	Pelaut	14	0	14	0,03%
77	Peneliti	0	0	0	0,00%
78	Sopir	263	0	263	0,60%
79	Pialang	0	0	0	0,00%
80	Paranormal	2	0	2	0,00%
81	Pedagang	176	364	540	1,24%
82	Perangkat Desa	129	16	145	0,33%
83	Kepala Desa	18	3	21	0,03%
84	Biarawati	0	0	0	0,00%
85	Wiraswasta	3.672	1.407	5.079	11,65%
86	Lainnya	0	0	0	0,00%
	JUMLAH			47.965	100%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Jaken sebagai berikut:

Tabel II.11

Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Jaken

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	22.949	24.964	47.913	98,50%
2	Kristen	7	5	12	1,27%
3	Katolik	20	12	32	0,09%
4	Hindu	5	3	8	0,00%
5	Budha	0	0	0	0,005%
6	Konghuchu	0	0	0	0,00%
7	Aliran Kepercayaan	0	0	0	0,00%
	JUMLAH			47.965	100%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintahan nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Jaken didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Jaken dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.12
Angka Kriminlitas di Kecamatan Jaken

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kasus narkoba	na	na	Na	0	0
2	Jumlah kasus pembunuhan	na	na	Na	0	0
3	Jumlah kejahatan seksual	na	na	Na	2	3
4	Jumlah kasus penganiayaan	na	na	Na	4	3
5	Jumlah kasus pencurian	na	na	Na	17	15
6	Jumlah kasus penipuan	na	na	Na	2	3
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	na	na	Na	0	0
8	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	na	na	Na	25	24
9	Jumlah penduduk	na	na	Na	47.951	47.965
10	Angka kriminalitas (8)/(9)	na	na	Na	5,76	5,53

(Rumus Angka Kriminalitas: jumlah tindak kriminal selama setahun dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000)

2. Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Terkait dengan ketersediaan Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Kecamatan Jaken dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.13**Data Poskamling di Kecamatan Jaken**

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1.	Boto	4	5	9
2.	Trikoyo	12	5	17
3.	Sumberan	4	0	5
4.	Mojolampir	10	2	12
5.	Mantingan	12	3	15
6.	Ronggo	29	5	35
7.	Sumberagung	9	4	13
8.	Sidoluhur	12	5	17
9.	Srikaton	12	3	15
10.	Arumanis	18	3	21
11.	Tegalarum	13	3	16
12.	Sidomukti	6	3	9
13.	Mojoluhur	9	5	14
14.	Kebonturi	9	2	11
15.	Lundo	7	3	10
16.	Sukorukun	8	2	10
17.	Sumberejo	25	4	29
18.	Manjang	8	4	12
19.	Tamansari	5	3	8
20.	Sumberarum	10	3	13
21.	Sriwedari	17	3	20
	J U M L A H	242	69	311

3. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Jaken dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.14
Data Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Jaken

No	Desa	Linmas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1.	Boto	7	0	7
2.	Trikoyo	16	14	30
3.	Sumberan	22	4	26
4.	Mojolampir	6	0	6
5.	Mantingan	25	6	31
6.	Ronggo	12	0	12
7.	Sumberagung	22	0	22
8.	Sidoluhur	14	11	25
9.	Srikaton	27	4	31
10.	Arumanis	20	2	22
11.	Tegalarum	21	0	21
12.	Sidomukti	10	0	10
13.	Mojoluhur	12	0	12
14.	Kebonturi	20	0	20
15.	Lundo	18	12	30
16.	Sukorukun	15	15	30
17.	Sumberejo	20	2	22
18.	Manjang	15	0	15
19.	Tamansari	18	2	20
20.	Sumberarum	15	3	18
21.	Sriwedari	20	2	22
	J U M L A H			

Evaluasi capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jaken periode 2012-2017 sebagai berikut.

Tabel II.15
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JAKEN
KABUPATEN PATI

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Kriminalitas		4		6,1	5,8	5,2	4,5	4	6,3	6,1	5,6	5,0	4,5	1,03	1,05	1,08	1,11	1,13
2	Jumlah pos kampling aktif dibagi jumlah pos kampling yang ada x 100%		40		20	25	30	35	40	19	26	30	35	40	0,95	1,04	1	1	1
3	Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%		30		20	23	25	27	30	18	21	24	26	30	0,90	0,91	0,96	0,96	1
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi		15		13,5	13,7	14	14,5	15	12,4	13	13,5	14	14,6	0,91	0,94	0,96	0,96	0,97
5	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
6	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten		4		4	4	4	4	4	1	2	2	2	2	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5
7	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		35		29	31	32	34	35	26	27	28	30	33	0,89	0,87	0,93	0,88	0,94
8	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten		4		1	1	2	3	4	0	0	1	2	3	0	0	0,5	0,66	0,75
10	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan		2,8		2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	0,91	0,96	0,96	0,96	0,96
11	Persentase Realisasi Capaian RKPDes		60		48	50	52	57	60	45	47	50	55	57	0,93	0,94	0,96	0,96	0,95
12	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		100		100	100	100	100	100	87	88	90	94	95	0,87	0,88	0,90	0,94	0,95
13	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu		100		100	100	100	100	100	90	90	91	92	95	0,90	0,90	0,91	0,92	0,95
14	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan		55		51	52	53	54	55	40	42	45	47	49	0,78	0,79	0,84	0,87	0,89
15	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		65		45	50	55	60	65	39	41	47	51	56	0,86	0,82	0,85	0,85	0,86

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Jaken sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2013 s/d 2017 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Jaken sebagaimana tabel berikut.

Tabel 16
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JAKEN
KABUPATEN PATI

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	104.194	108.559	129.782	134.186	197.747	102.594	106.500	125.782	132.186	159.976	98,46	98,10	96,92	98,51	80,90	92,97	94,58
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	46.198	52.402	103.113	97.693	73.995	43.556	51.500	102.500	96.500	52.639	94,28	98,28	99,41	98,78	71,14	92,85	92,38
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6.390	9.900	14.400	14.000	14.000	6.250	9.900	14.400	14.000	14.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	99,76	80,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.965	2.950	4.000	4.000	6.333	1.965	2.950	4.000	4.000	3.387	-	100,00	100,00	100,00	53,48	84,69	70,70
Program Penataan Administrasi Kependudukan	67.080	62.400	64.741	57.300	5.031	66.600	62.400	64.741	57.300	3.036	99,28	100,00	100,00	100,00	60,35	99,04	91,93
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	8.700	25.957	26.910	11.070	13.645	8.700	25.957	26.910	11.070	13.645	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	14.929	39.000	42.864	36.403	22.285	14.929	39.000	42.864	36.403	15.290	100,00	100,00	100,00	100,00	68,61	95,50	93,72
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	5.600	7.312	8.770	10.114	9.685	5.600	7.311	8.770	10.114	6.984	100,00	99,99	100,00	100,00	72,11	93,49	94,42
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.000	14.037	15.555	14.515	14.449	4.000	14.037	15.555	14.515	14.449	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik	-	22.500	19.804	2.804	52.684	-	22.500	19.804	2.804	49.942	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	94,80	97,20	#DIV/0!
	259.056	345.017	429.939	382.085	409.854	254.194	342.055	425.326	378.892	333.348	98,12	99,14	98,93	99,16	81,33	94,95	95,34

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Jaken merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Jaken kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2017-2022) sebagai berikut.

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru.

Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprogramkan bergerak ke arah Smart City memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas). Fokus pengembangan pelayanan kurun lima tahun ke depan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.